

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah fans K-pop tertinggi di dunia. Sebagai salah satu asosiasi dan bentuk budaya populer, K-Pop menunjukkan perkembangannya dalam beberapa waktu terakhir di media sosial twitter. Berikut data terkait negara dengan volume Tweet K-Pop terbanyak di dunia.

Gambar 1. 1  
Negara dengan Volume Tweet K-Pop Terbanyak tahun 2020-2021



Sumber : Twitter Data, 2021

Dilihat dari volume tweet K-Pop, Indonesia berada pada peringkat pertama sebagai negara dengan volume tweet K-pop terbanyak di dunia periode tahun 2020-2021. Data tersebut disimpulkan berdasarkan jumlah pengguna unik K-Pop di Twitter dan jumlah cuitan K-Pop dalam periode 1 Juli 2020 hingga 30 Juni 2021.

Tingginya animo masyarakat terhadap K-Pop membuat berita dan informasi terkait K-Pop menjadi salah satu hal yang begitu diminati dan banyak dicari. Hal tersebut menjadikan beberapa media di Indonesia kini juga menjangkau berita-

berita K-Pop sebagai salah satu rubrik pemberitaannya. Segala pemberitaan mengenai aktris maupun aktor K-Pop itu sendiri membuat isu-isu yang tak kalah penting terkait K-Pop luput dari perhatian penikmat K-Pop dan masyarakat luas meski memiliki nilai kepentingan yang cukup tinggi untuk diketahui.

K-Popers mulai menunjukkan eksistensi dan kekuatan mereka dengan turut serta membantu memobilisasi dari peristiwa tertentu sesuai dengan tujuan mereka masing-masing melalui unggahan pembanjiran *fancam* yang mereka unggah di media sosial. Eksistensi K-popers di Indonesia terlihat pada hadirnya fenomena gerakan sosial dan aktivisme yang dilakukan secara digital yang disuarakan oleh para komunitas pecinta musik Korean Pop, atau K-Popers di media sosial Twitter dalam rangka mengawal kasus Omnibus Law UU Cipta Kerja. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh penelitian yang membahas terkait K-Popers yang telah memperkuat pesan ataupun konten yang diunggah oleh akun organisasi mahasiswa dan aktivis politik di Twitter (Lasut et al., 2020) dengan judul aktivisme digital fandom army Indonesia dalam menanggapi isu RUU Cipta Kerja yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretative. Sehingga partisipasi politik yang bersumber dari twitter telah mendorong publik untuk berani melakukan protes digital, hingga keberanian menolak sebuah kebijakan yang telah digulirkan oleh *elite* politik. Aksi penolakan digital dalam pembahasan UU Cipta Kerja memiliki peran yang sangat besar dalam berpartisipasi dengan membangun komunikasi politik sekaligus menunjukkan kreativitas K-popers dalam memproduksi konten di media sosial. Hal ini juga sama halnya dengan penelitian oleh (Fadillah et al., 2022) yang membahas terkait kemudahan akses digital yang mendukung, mengonsumsi,

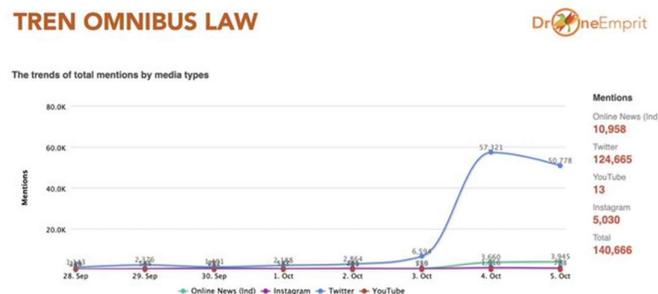
mendistribusikan dan memproduksi gerakan sosial di suasana politik Indonesia yang tidak menentu terkait Omnibus Law. Hal ini berarti generasi milenial pecinta musik K-Pop menunjukkan antusiasme terhadap isu-isu sosial dan politik sehingga partisipasi politik yang bersumber dari media sosial telah mendorong publik untuk berani melakukan protes digital, hingga keberanian menolak sebuah kebijakan yang telah digulirkan oleh elite politik seperti pada penolakan digital kasus RUU Cipta Kerja di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia saja, seperti yang digambarkan pada penelitian (Andini & Akhni, 2021) yang menjelaskan K-Popers negara Thailand juga melakukan hal yang sama seperti di Indonesia. Dimana sama-sama melakukan suatu gerakan sosial sebagai protes dan demonstrasi menentang pemerintah dan mengkritik kebijakan tertentu. Di Thailand, sejak awal 2020 berbagai media melaporkan ribuan K-popers yang menyerukan reformasi politik dan menghentikan tindakan kekerasan dan pelecehan terhadap para kritikus pemerintah. Begitupula K-Popers dari Indonesia yang membantu menaikkan tagar terkait Omnibus Law yang menjadi trending topik di media sosial Twitter. Kesamaan penelitian ini dengan 3 kajian penelitian di atas terletak pada komunitas K-Popers sebagai subjek yang sama dan aktivitas yang diusung yaitu melakukan gerakan protes. Kajian penelitian yang dilakukan terkait aktivisme digital juga dibahas dalam penelitian ini. Namun, yang membedakan ketiganya menjadi rujukan terhadap proses aktivisme digital yang telah dilakukan sebelumnya terletak pada isi dari pembahasannya. Dimana ketiga penelitian tersebut membahas terkait teknis dari gerakan yang diusung oleh K-popers, berbeda dengan penelitian ini yang terfokus pada faktor yang memotivasi K-Popers turut andil dalam menyuarakan penolakan

kasus Omnibus Law dan implikasi dari partisipasi K-Popers terhadap kasus UU Cipta Kerja yang sedang di suarakan.

Konsep UU Cipta Kerja hadir ketika kata Omnibus Law menjadi topik pidato pada tanggal 20 Oktober 2019 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yang ingin mempermudah regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja serta menghambat pertumbuhan UMKM. Faktanya, Undang-Undang ini menuai banyak protes. Beberapa alasan penolakan ini didasarkan pada kenyataan bahwa isi dari Undang-Undang ini merugikan bagi keberlangsungan tenaga kerja yang sebelumnya diatur lebih baik dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal tersebut mengakibatkan penolakan hampir di seluruh penjuru Indonesia, sehingga terlaksana aksi demonstrasi menuntut agar Presiden Joko Widodo mencabut UU Cipta Kerja.

Aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja tidak hanya melalui aksi demonstrasi di jalanan saja, penolakan juga masif dilakukan di media sosial terkhusus pada media sosial twitter. Hal ini dibuktikan dengan adanya lonjakan total mention terkait UU Cipta Kerja, seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1. 2  
Tren Total Mentions oleh Media Sosial



Sumber : Website Resmi Drone Emprit, 2022

Dapat dilihat bahwa telah terjadi lonjakan total *mention* pada tanggal 4 – 5 Oktober 2020. Selama ini percakapan terkait UU Cipta Kerja cukup rendah, hanya 2000 per hari di Twitter. Namun, pada tanggal 4 Oktober melonjak drastis menjadi 57.321 *mentions*. Dan pada tanggal 5 Oktober masih mencapai angka 50.778 *mentions*. Kenaikan yang drastis ini dipicu oleh DPR yang mengadakan rapat pada Sabtu malam tanggal 3 Oktober 2020 untuk memutuskan nasib UU Cipta Kerja.

Kasus ini menjadi perhatian di Indonesia bahkan hingga dunia, yang mana para fans K-Pop turut menyatakan keresahannya terhadap pengesahan UU Cipta Kerja Omnibus Law. Keberadaan Undang-Undang ini dirasa merugikan berbagai pihak dan semakin memarginalisasikan kaum buruh. Perlawanan terjadi baik secara langsung di jalanan hingga mewarnai jagat dunia maya yang disuarakan oleh K-Poppers, seperti yang terlihat pada data *top influencer* yang mendominasi percakapan omnibus law seperti di bawah ini.



Sumber: Website resmi Drone Emprit, 2022

Dari gambar *Top Influencer* yang Mendominasi Percakapan Omnibus Law, dapat dilihat bahwa akun twitter yang menggunakan foto profil selebriti Korea mendominasi percakapan mengenai Omnibus Law UU Cipta Kerja yang ada di

media sosial. Pergerakan fans K-Pop di media sosial membuat topik berkaitan dengan Omnibus Law berhasil menduduki *trending topic* dunia.

Dalam pemantauan twitter, ditemukan data terkait munculnya tren tagar Twitter Indonesia selama tanggal 4-5 Oktober 2020 ketika demonstrasi mulai pecah di berbagai daerah. Pergerakan fans K-Pop dengan topik Omnibus Law memunculkan berbagai macam tagar yang *trending* di twitter. Berikut berbagai macam tagar yang muncul.

Gambar 1. 4  
*Top Hashtag Trending Omnibus Law*



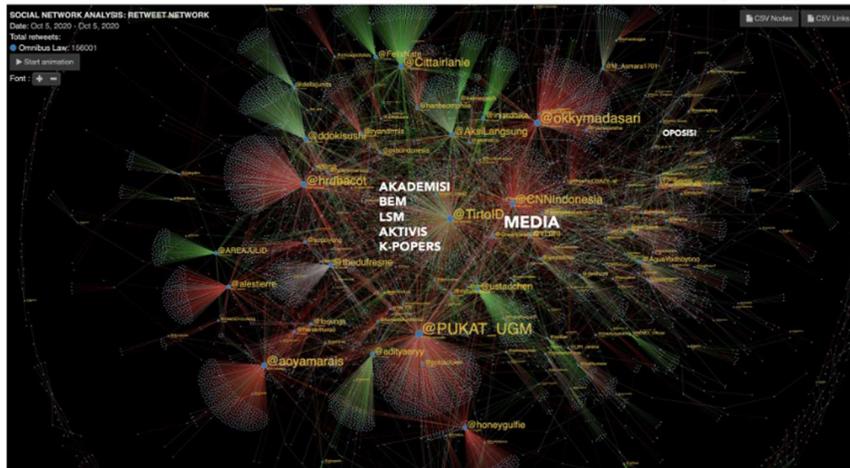
Sumber : Website Resmi Drone Emprit, 2022

Berdasarkan gambar *Top Hashtag Trending Omnibus Law*, Fans K-Pop berpadu dan mengangkat tagar dengan mayoritas tagar penolakan seperti #BatalanOmnibusLaw, #MosiTidakPercaya, #DPRRIKhanatirakyat, #Jegalsampaigagal, #TolakOmnibusLaw, hingga #TolakRUUCipta Kerja. Tidak sampai disitu, Fans K-Pop turut meramaikan dengan tagar lain seperti #DPRDisbandParty dan #DPRFlop yang memiliki makna yaitu lembaga DPR harus bubar dan lembaga DPR gagal dalam mendengarkan suara rakyat. Hal ini pun diketahui oleh salah satu grup asal Korea Selatan yaitu *Dream Perfect Regime*

(DPR) yang secara tidak sengaja memiliki singkatan nama yang sama dengan lembaga legislatif Indonesia yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Para K-Popers juga turut aktif menyuarakan keresahannya bersama pihak lainnya seperti partai politik, lembaga swadaya masyarakat, organisasi mahasiswa, serikat pekerja, aktivis hingga media untuk bersama-sama membuat kluster kontra omnibus law.

Gambar 1. 5  
Peta SNA Omnibus Law



Sumber: Drone Emprit, 2022

Berdasarkan gambar Peta SNA (*Social Network Analysis*) Omnibus Law, hanya terdapat satu pola dengan kluster besar yaitu kluster Kontra Omnibus Law yang melakukan penolakan. Akun-Akun tersebut yaitu Akun akademisi, Akun BEM, Akun LSM, Akun Aktivis dan Akun K-Popers yang bersatu saling mendukung dalam kluster penolakan Omnibus Law. Sedangkan akun dari media massa seperti Tirto, CNN Indonesia, Kompas, dan Tempo berada di tengah sebagai referensi. Di sisi lain, akun-akun yang selama ini terafiliasi sebagai oposisi berada di satu sudut kluster.

Selain penjelasan secara empirik, dalam penelitian ini terdapat penjelasan latar belakang secara teoritik dimana demokrasi digital merupakan tema penting dalam pembaruan kajian ilmu politik terutama dalam sikap mewujudkan partisipasi politik. Dalam kehidupan politik, kehadiran media baru telah menyodorkan fenomena baru, yaitu yang dikenal sebagai demokrasi digital.

Dalam perkembangan lebih lanjut, internet pula yang kemudian mendorong kelas menengah tampil sebagai lokomotif demokrasi dengan hadir sebagai warganet yang mengawal demokrasi. Seiring dengan perkembangan semakin masifnya penggunaan internet, mengindikasikan bahwa kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah membawa demokrasi mengalami pergeseran dari demokrasi masyarakat *offline* menuju pada arah demokrasi online. Masyarakat sekarang telah bergeser menuju ke arah masyarakat informatif yang sedikit banyak telah mengubah metode komunikasi politik. Melalui internet, kaum warganet telah ikut terlibat secara aktif dalam proses-proses pengambilan keputusan strategis dalam bidang politik dan kebijakan publik. Kaum warganet juga aktif memberikan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Tidak terkecuali dalam proses Pilkada, demokrasi digital tampak mulai mengambil peran strategis dengan tampil di ruang publik secara virtual, melakukan diskusi kritis (Gatara, 2016).

Demokrasi kini tidak lagi hanya termediasi oleh media massa konvensional seperti media massa cetak dan elektronik, namun demokrasi telah termediasi oleh *new media* (Internet). Proses demokrasi seperti kontestasi suara warga, konstruksi opini para tim sukses, dan konstruksi citra para kandidat tidak saja berlangsung

secara *face to face* dan *offline*, namun juga telah berlangsung *virtual* dan *online* (Fauzanafi, 2016). Oleh sebab itu, dewasa ini politik terutama dilihat dari ruang praktiknya, terbagi menjadi politik *offline* dan politik *online*.

Pada awalnya demokrasi digital dibayangkan beroperasi pada seluruh ruang *cyber*. Hal itu didasari oleh asumsi optimisme bahwa internet pada hakikatnya merupakan ruang publik, yakni, ruang di mana kebebasan informasi terlahir dan hadir secara universal yang dapat menciptakan aktivitas digital yang menginisiasi hadirnya sebuah gerakan sosial. Aktivisme digital telah memberikan peluang baru dan mempromosikan suatu gerakan sosial yang muncul di tengah masyarakat sebagaimana ditunjukkan pada penelitian (George & Leidner, 2019) dengan judul *from clicktivism to hacktivism: understanding digital activism* yang metodenya mengkomparasikan berbagai macam artikel dengan menggunakan teori *social movements dan digital activism*; (Schradi, 2018) dengan judul penelitian *the digital activism gap: how class and costs shape online collective action* yang metodenya menggunakan etnografi dengan pengumpulan data wawancara mendalam dengan menggunakan teori *social movement egalitarianism and digital activism*; (Chusna, 2021) dengan judul penelitian gerakan #dirumahajasebagai aktivisme digital pada akun media sosial najwa shihab dengan metode deskriptif kualitatif dengan teori aktivisme digital; (Wijayanto et al., 2021) dengan judul penelitian menciptakan ruang siber yang kondusif bagi pegiat anti-korupsi dengan metode penelitian campuran interdisiplin yang menguji dan mengembangkan integrasi teknik komputasi dan kerja lapangan kualitatif. Melalui aktivisme digital

membantu para aktivis dengan kuat merebut kembali tujuan mereka dan melawan wacana yang menormalkan ketidakadilan yang dirasakan (Wang & Zhou, 2021).

Aktivisme digital mengambil banyak bentuk dari sikap seseorang pada isu yang di politisasi yang muncul di berbagai macam platform media sosial. Media sosial memfasilitasi aktivisme online dalam tiga cara utama yaitu menghubungkan perspektif individu dengan tujuan aktivis tertentu, mengorganisir komunitas aktivis, dan menegosiasikan realitas bersama dengan pihak luar sebagaimana yang digambarkan pada penelitian (Greijdanus et al., 2020) dengan judul *the psychology of online activism and social movements: relations between online and offline collective action* dengan menggunakan metode campuran kualitatif dan kuantitatif dan menggunakan konsep psikologi gerakan sosial aktivisme digital dan media sosial. Disini terjadi perdebatan terkait peran media digital dalam memfasilitasi gerakan sosial, dimana teknologi digital memungkinkan individu untuk membuat pesan secara personal dan bersama-sama menciptakan makna tentang isu-isu sosial, sehingga menghasilkan pergeseran paradigma tindakan kolektif ke tindakan yang mengikat. Di sisi lain munculnya tindakan yang mengikat ini menantang perlunya proses keterlibatan organisasi formal sebagai aktivis yang mengklaim diri mengambil tindakan untuk mengkoordinasikan diri mereka sendiri. Sehingga melalui aktivisme digital membantu para aktivis dengan kuat merebut kembali tujuan mereka dan melawan wacana yang menormalkan ketidakadilan yang dirasakan.

Aktivisme digital di media sosial diakui sebagai pendorong kuat gerakan sosial yang menandakan era baru perjuangan politik, dengan banyak pemuda secara

aktif berbicara menentang ketidakadilan yang ada sebagaimana yang terlihat pada penelitian (Lee et al., 2022) dengan judul penelitian *motivations of online and offline activism against racism and xenophobia among asian-american publics during the covid-19 pandemic* yang menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui *panel qualtrics survei online* dengan teori *social movements*; (Abimbade et al., 2022) dengan judul penelitian *millennial activism within nigerian twitterscape: from mobilization to social action of #endsars protest* dan menggunakan teori *social movements* dan *activism digital*.

Para aktivis sering menggunakan media sosial untuk penggunaan yang baik sebagaimana pada jurnal (Ciszek, 2016) dengan judul penelitian *digital activism : how social media and dissensus inform theory and practice* yang menggunakan metode kualitatif analisis data tematik dengan teori *dissensus inform theory*. Media digunakan untuk menggeser keseimbangan kekuasaan yang semena-mena dan berfungsi sebagai alat perlawanan dan *platform* alternatif untuk komunikasi, tidak hanya bersifat penghubung, media sosial yang digambarkan pada penelitian (George & Leidner, 2019) dapat digunakan sebagai selubung untuk menyembunyikan tindakan sosial yang lebih langsung dalam isu tertentu, selain itu media sosial dapat berfungsi sebagai gudang data untuk menginformasikan praktik hubungan antar masyarakat. Aktivisme digital dan media sosial sangat penting dalam pergolakan politik yang disebutkan oleh (Thomas et al., 2022) dengan judul penelitian *#whatshappeninginthailand: power dynamics of thailand digital activism* yang menggunakan metode etnografi digital dengan konsep teori aktivisme digital

Melalui aktivisme digital, terjadi peluang dari penggunaan internet yang dapat membantu kelompok masyarakat sipil melakukan partisipasi dengan membuat suara mereka didengar dan memobilisasi aktivisme secara lebih luas ketika mereka mencoba menantang elit politik dan menuntut tata kelola yang efektif dan akuntabel. Partisipasi online mendorong komunikasi dua arah, konsultasi dan dialog antara pemerintah dan warga negara, melegitimasi keputusan pemerintah meningkatkan ruang lingkup saling belajar sebagaimana dalam jurnal (Khan & Krishnan, 2017) dengan judul penelitian *social media enabled e-participation : review and agenda for future research. E-service* yang menggunakan teori partisipasi online dan (Feezell & Feezell, 2016) dengan judul penelitian *predicting online political participation: the importance of selection bias and selective exposure in the online setting* yang menggunakan teori partisipasi politik online. Partisipasi ini berarti adanya keterlibatan dalam aksi bersama yang merupakan kunci penting dari sebuah gerakan sosial dijalankan, dengan partisipasi online berarti mengambil bagian dalam rangkaian kegiatan media digital yang berkomitmen untuk mendukung gerakan tersebut (Letcher, 2018) dengan judul penelitian *online political participation , collective action events , and meaningful citizen engagement* yang menggunakan teori partisipasi politik online dan gerakan sosial. Penggunaan internet memiliki dampak yang kuat pada partisipasi politik. Seiring dengan meluasnya adopsi media sosial, internet sekarang menjadi alat penting untuk mobilisasi politik karena dapat mendorong keterbukaan, transparansi, dan meningkatkan daya tanggap pemerintah maupun para politisi (Best & Krueger, 2005) dengan judul penelitian *analyzing the representativeness*

*of internet political participation* yang menggunakan teori partisipasi politik. Melalui digitalisasi ini mendukung gerakan sosial di suasana politik Indonesia yang tidak menentu terkait munculnya gerakan penolakan yang dinisiasi oleh K-popers terhadap kasus Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di media sosial (Najibulloh et al., 2022);(Setiawan et al., 2021);(Wijaya et al., 2021); dan (Ihsan & Adnan, 2022).

Fenomena politik yang terjadi dalam kalangan K-Popers saat ini merupakan suatu peristiwa yang tidak biasa terjadi dalam sebuah partisipasi politik. Penggemar K-Pop yang mulanya hanya menggunakan koneksi mereka untuk mendukung idolanya, kini melebarkan sayap mereka untuk turut terlibat dalam berbagai isu politik. Motivasi dari gerakan yang diusung K-popers sangatlah penting mengingat hal ini merupakan fenomena baru. Disinilah peran fans K-Pop dibutuhkan untuk memobilisasi sebuah isu politik, dalam hal ini terhadap kasus Omnibus Law UU Cipta Kerja tersebut sehingga dapat menjadi perbincangan di masyarakat. Karena latar belakang tersebutlah, penulis kemudian mengambil judul penelitian tesis ini yaitu *Aktivisme Politik K-Popers Terhadap Pengawasan Isu Omnibus Law UU Cipta Kerja di Twitter yang terfokus pada motivasi yang melatarbelakangi K-popers dalam penolakan dimana belum pernah dibahas pada riset sebelumnya.*

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang empirik dan teoritik, perumusan masalah dalam penelitian ini diidentifikasi melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- 1.2.1 Faktor- faktor apa yang memotivasi K-Popers untuk turut melakukan penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja ?

1.2.2 Bagaimana implikasi dari gerakan aktivisme digital yang dilakukan K-Popers terhadap omnibus law di twitter ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah yang sesuai dengan prinsip penelitian, maka penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, sebagai berikut:

1.3.1 Untuk menganalisis faktor-faktor yang memotivasi K-popers turut andil dalam memprotes penolakannya terhadap omnibus law di twitter.

1.3.2 Untuk menganalisis implikasi dari gerakan aktivisme digital yang dilakukan oleh K-Popers dalam penolakannya terhadap kasus omnibus law yang dilakukan melalui media sosial twitter.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini sekurang-kurangnya diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

#### 1.4.1 Manfaat Akademis

Melalui penelitian tentang aktivisme digital yang dilakukan oleh generasi milenial K-Popers di twitter sebagai bentuk partisipasi politik dalam pengawalan kasus omnibus law ini, dapat menjadi penunjang ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu politik terkhusus segi aktivisme K-popers dalam pengawalan kasus Omnibus Law. Selain itu, diharapkan pula menjadi penunjang bagi pembaca dalam memperluas ilmu pengetahuan mengenai segala respon dan pengaruh dari aktivisme digital K-Popers terhadap penolakan kasus Omnibus Law. Dengan penelitian ini pula,

diharapkan dapat menjadi referensi untuk dilakukannya penelitian selanjutnya.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan memberi dampak baik dan nyata bagi masyarakat. Dalam rangka menambah wawasan mengenai pentingnya turut berpartisipasi politik terhadap suatu isu yang dirasa kurang mensejahterakan rakyat. Bagi stakeholders, diharapkan melalui penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk dapat mengefektifkan penguatan internal dan eksternal dari sebuah lembaga pemerintahan agar dapat berjalan sebagaimana performa mesin yang baik agar pemerintah dapat lebih mensejahterakan rakyat.

### 1.5 Kerangka Teori

#### 1.5.1 Teori Aktivisme Digital

Peran *new media* sangat penting dalam tiga hal yang saling berkaitan, seperti memungkinkan aktivisme siber, yang merupakan pemicu utama aktivisme jalanan; mendorong keterlibatan sipil dengan membantu mobilisasi dan organisasi protes dan bentuk ekspresi politik lainnya; mempromosikan bentuk baru jurnalisme warga, yang menyediakan platform bagi warga biasa untuk mengekspresikan diri dan mendokumentasikan versi realitas mereka sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan definisi istilah-istilah ini untuk lebih memahami relevansi dan penerapannya.

Menurut Howard (dalam Vaughn, 2011) mendefinisikan aktivisme digital atau yang dapat disebut dengan aktivisme siber, aktivisme daring,

dan *cyberactivism* adalah tindakan menggunakan internet untuk mengembangkan basis politik yang sulit dikembangkan secara offline, tujuan aktivisme semacam itu seringkali untuk menciptakan artefak digital secara intelektual dan emosional yang persuasif yang menceritakan ketidakadilan, interpretasi sejarah dan advokasi.

Tujuan dari aktivisme digital juga sering untuk menciptakan berkas digital yang menarik secara intelektual dan emosional dalam menceritakan sebuah ketidakadilan, menafsirkan sejarah dan mengadvokasi untuk hasil politik tertentu. Perilaku ini berbeda dengan mobilisasi karena berfokus pada perencanaan pelaksanaan, dan fasilitasi tindakan. Akan tetapi keduanya saling berkaitan, karena *cyberactivism* dapat membantu memberikan dorongan dan mempromosikan keterlibatan sipil yang pada akhirnya juga akan melahirkan berbagai macam bentuk mobilisasi.

Aktivisme digital juga dikemukakan oleh Tapsell (dalam Wijayanto et al., 2021) yang mengemukakan bahwa internet dapat membuat orang biasa maupun pemegang kekuasaan mendapatkan lebih banyak kekuatan. Internet memberi semakin banyak instrumen orang biasa untuk berpartisipasi dalam diskusi, membentuk konten media, dan melobi politisi agar suara mereka didengar dan membawa perubahan yang berarti.

(Joyce et al., 2010) dalam bukunya yaitu "*Digital Activism Decoded*", mendefinisikan aktivisme digital yaitu kegiatan meluasnya penggunaan teknologi digital dalam kampanye untuk perubahan sosial dan politik. Aktivisme digital juga dapat dimaknai sebagai pemanfaatan media

digital dalam usaha-usaha kolektif untuk menghasilkan perubahan sosial dan politik. Aktivisme digital juga mempermudah membentuk opini publik, merencanakan aksi, memobilisasi aksi dan melakukan aksi digital seperti donasi atau petisi online.

Adapun definisi lain dari aktivisme digital yaitu penggunaan internet secara luas untuk memberikan informasi yang berlawanan dan menginspirasi mobilisasi sosial (Morris & Langman, 2003) *Cyberactivism* juga dapat didefinisikan sebagai aktivisme sosial yang dibantu oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Menurutnya, *cyberativism* dimungkinkan untuk membagi 4 kelompok pengguna internet, yaitu :

- a. Pengguna teknologi untuk memperluas kelompok, merekrut anggota, dan mengkoordinasikan kegiatan dan gerakan organisasi.
- b. Teknologi ini dapat digunakan untuk menghasilkan liputan media untuk kelompok yang tidak memiliki liputan medi *mainstream*.
- c. Teknologi menciptakan ruang public virtual dimana pesertanya dapat mempraktikkan demokrasi.
- d. Terjadinya tindakan peretasan ke dalam system komputer untuk tujuan politik atau sosial, penggunaan yang lain dapat juga membantu aktivis untuk mengganggu atau memanipulasi teknologi internet untuk memenuhi tujuan politik.

*Cyberactivism* dilihat sebagai alat perubahan dan demokrasi, karena kemampuannya untuk menjangkau para aktor penting yang ada di seluruh

dunia. *Cyberactivism* juga dipandang sebagai suatu hal yang penting menuju perubahan sosial yang progresif. Sehingga penting untuk mempelajarinya sebagai bagian dari organisasi pergerakan sosial, karena di dalamnya juga memiliki efek sentimental pada politik, transformasi sosial, perubahan sosial dan teori gerakan sosial. Hal ini terjadi berkat tidak adanya batasan geografis apapun, sehingga gagasan ini terus dipromosikan untuk menciptakan ruang public virtual dimana dimungkinkan untuk mengejar tujuan politik tanpa kendala apapun.

#### 1.5.1.1 Jenis-Jenis Aktivisme Digital

Adapun tindakan-tindakan *cyberactivism* dilakukan melalui beberapa cara, seperti berikut (Lim, 2013):

##### a. Slacktivism

Terdapat berbagai macam cara untuk ikut berpartisipasi terkait alat media sosial yang tersedia dalam spektrum ekologi web, seperti membuat koneksi, menambahkan komentar, menandai foto dan video, berbagi informasi, dan mengungkapkan pendapat dapat membuat individu terlibat dalam kegiatan politik ataupun social.

##### b. Hacktivism

Peretasan dapat digunakan untuk merujuk pada kegiatan entitas yang disponsori oleh pemerintah, kelompok criminal yang mencari akses informasi *online* untuk mendapat keuntungan,

atau pemrotes mengambil tindakan dunia maya sebagai tanggapan terhadap masalah yang menjadi perhatian.

c. Petisi *Online*

Pada dasarnya petisi *online* adalah bentuk partisipasi politik yang menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Di sisi lain bentuk partisipasi politik ini juga dapat ditujukan kepada kepentingan sosial. Pengaruh petisi *online* terhadap suatu masalah adalah sebuah solusi dalam pelaksanaan advokasi kebijakan, argumentasi serta saran publik yang akan langsung tersampaikan kepada target yang dituju.

1.5.1.2 Karakteristik Aktivisme Digital

Terdapat banyak pandangan terkait karakteristik dari *cyberactivism*, yang menyajikan bahwa tiga kategori besar *cyberactivism*:

- a. Kesadaran dan informasi, seperti kampanye yang dipromosikan oleh *Amnesty International*, *Greenpeace*, atau *Human Right Telematic Network*.
- b. Organisasi dan mobilisasi, hal ini terjadi di seluruh lingkup internet guna mendukung tindakan tertentu (undangan untuk tindakan nyata yang akan dilakukan).
- c. tindakan jaringan yang melibatkan banyak jenis tindakan elektronik, seperti pengiriman masal *e-mail*, penandatanganan petisi dan pemblokiran akses melalui *DoS (Denial of Service)*.

Selanjutnya terkait penelitian bagaimana internet mendukung infrastruktur organisasi. Terdapat model yang menggambarkan bahwa penggunaan internet dapat dijelaskan oleh interaksi tiga faktor dalam konteks politik, termasuk :

- a. Orientasi tujuan organisasi, fungsi yang ingin dicapai organisasi dengan melakukan gerakan, dan struktur internal organisasi. Melalui tiga karakteristik diatas, suatu organisasi memutuskan untuk menggunakan tindakan yang sesuai untuk mencapai tujuannya (termasuk penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi).
- b. Ketersediaan sumber daya, merujuk kepada rendahnya biaya membuat situs web, yang kemudian memiliki kegunaan lebih lanjut dalam penyediaan konten yang mendukung suatu gerakan.
- c. Persepsi organisasi tentang peluang internet, merujuk pada berbagai Potensi Penggunaan internet untuk memfasilitasi berfungsinya organisasi.

Beberapa karakteristik dalam organisasi virtual adalah akses yang bebas, tidak ada moderasi, tidak ada aturan untuk masuk, tidak ada kepemimpinan, alur informasi yang bebas, dan diskusi dilakukan secara online Organisasi yang melakukan gerakan online setidaknya memiliki karakteristik bersifat horizontal (non-struktural) dan desentralisasi.

### 1.5.2 Teori Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting di dalam suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Secara umum, partisipasi politik didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dengan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.

Menurut Herberst Mc Closky (dalam Budiardjo, 2008) partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Hal yang diteropong terutama adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, sekalipun focus utamanya lebih luas tetapi abstrak, yaitu usaha-usaha

untuk memengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat (*the authoritative allocation of values for a society*).

Partisipasi politik menurut Michael Rush dan Philip Althoft (dalam Arniti, 2020) partisipasi politik sebagai kegiatan warga Negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pemimpin pemerintahan. Segala kegiatan warga Negara yang mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan umum termasuk dalam memilih pemimpin pemerintahan dapat digolongkan sebagai kegiatan partisipasi politik.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam bukunya yang berjudul pembangunan politik di Negara-negara berkembang memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Mereka berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, karena partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau *sporadic*, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif (Budiardjo, 2008).

#### 1.5.2.1 Faktor-Faktor Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Terdapat dua variable penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik

seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud 21 dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.

Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri (bukan variable independen). Artinya bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Selanjutnya partisipasi politik di pengaruhi oleh beberapa hal,

a. Modernisasi

Modernisasi disegala bidang akan berimplikasi pada komensialisme pertanian, industrial, meningkatkan arus

urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan 22 pendidikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas.

b. Terjadi perubahan struktur kelas sosial

Terjadinya perubahan kelas struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas era industrialisasi dan modernisasi.

c. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern

Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara.

d. Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik

Pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan massa.

e. Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial dan budaya

Meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintah ini seringkali merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.

#### 1.5.2.2 Tipologi Partisipasi Politik

Di negara-negara berkembang partisipasi politik cenderung digerakan secara meluas dan diarahkan untuk kepentingan pembangunan. Orang-orang yang melakukan demonstrasi atau memberikan suara dengan jalan tersebut tampaknya merupakan wujud nyata dari partisipasi politik yang mudah serta mengundang perhatian dari berbagai kalangan.

Secara umum, Adapun tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan berdasarkan kegiatan sebagai berikut :

a. Partisipasi Aktif

Merupakan partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.

b. Partisipasi pasif

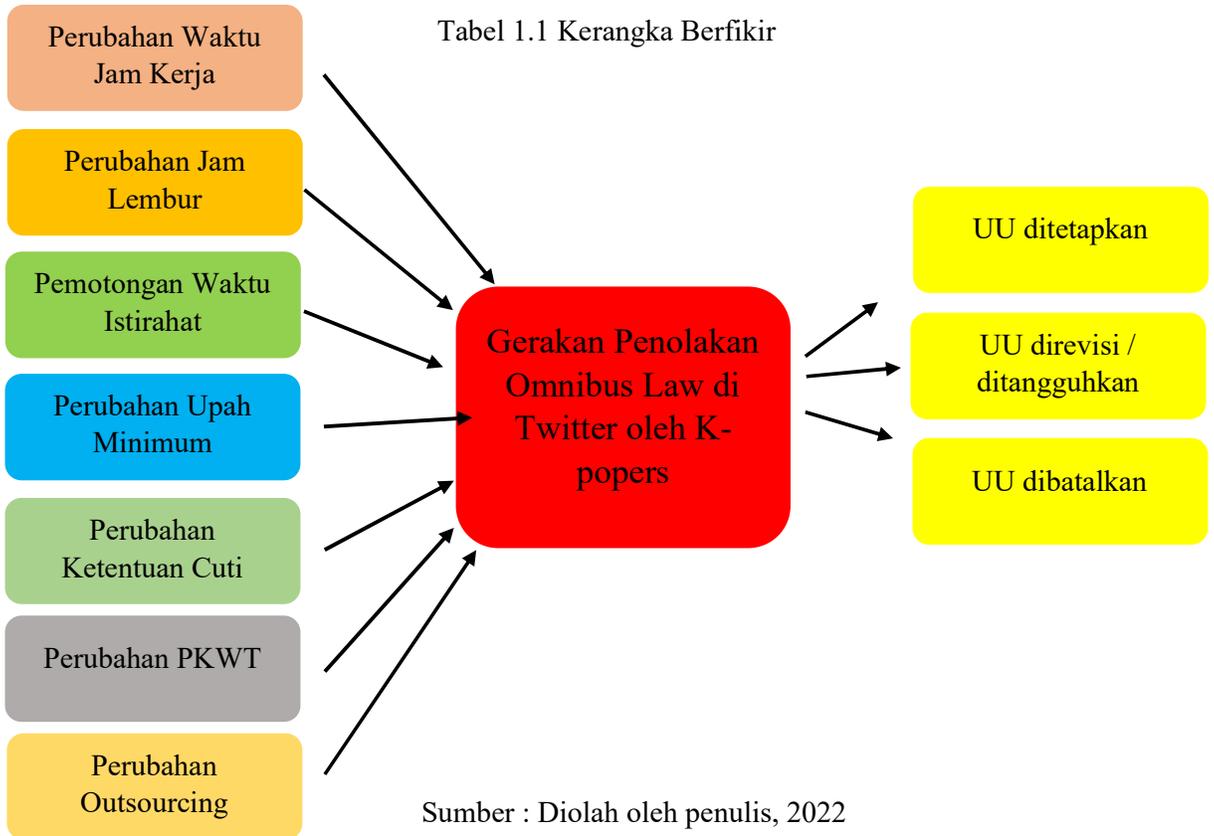
Merupakan partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja pada setiap keputusan pemerintah.

c. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis

Karena menggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan. Bahwa semua warga negara memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam mengevaluasi dan menentukan pemimpinnya, sehingga partisipasi politik, dalam hal ini keikutsertaan warga negara dalam Pemilu, menjadi penting. Pada sisi yang sama,

pemahaman yang baik terhadap peran-peran strategis warga negara juga akan mendorong kualitas demokrasi.

### 1.6 Kerangka Pemikiran



## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi digital. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dengan melihat apa yang dialami oleh subjek penelitian secara utuh dan menyeluruh dan kemudian dideskripsikan dengan kata-kata dengan menggunakan metode alamiah. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengamati bahasa tubuh, perilaku, motivasi, dan perkataan subjek (Creswell, 2012). Etnografi digital dimaksudkan untuk mengungkap fakta yang ada di internet baik yang terlihat nyata maupun tersirat dengan menggunakan data yang dapat dibuktikan. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui apa yang terjadi di dalam internet sehingga diperlukannya peneliti terjun ke lapangan guna mengetahui aktivisme fans K-Pop dalam mempengaruhi penolakan Omnibus Law.

### 1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini di media sosial, terutama media sosial Twitter. Media sosial Twitter digunakan karena menyesuaikan dengan permasalahan dan narasumber penelitian, yang mana Twitter merupakan media yang sering digunakan untuk menyuarakan pendapat, Twitter juga dijadikan media utama bagi para fans K-Pop untuk berinteraksi di media sosial.

### 1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu atau kelompok yang diamati sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti terhadap suatu penelitian. Subjek penelitian dibutuhkan untuk melengkapi data dan informasi yang dapat dijadikan acuan penelitian. Penelitian ini menggunakan 30 narasumber yang

merupakan pemilik akun K-popers yang turut menaikkan tagar penolakan UU Cipta Kerja di Twitter. Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan narasumber menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria tertentu. Penulis berhenti pada 30 informan karena ditemukan titik jawaban dan pembahasan secara berulang-ulang di 30 informan pada penelitian ini. Berikut adalah beberapa narasumber yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu :

1. Pemilik akun @inipacarwonwoo
2. Pemilik akun @alistierre
3. Pemilik akun @steguksendu
4. Pemilik akun @fairyjuin
5. Pemilik akun @awmochiii
6. Pemilik akun @blxxminggvrl
7. Pemilik akun @chanyoelekso
8. Pemilik akun @kjmbunny9
9. Pemilik akun @haechantiksun
10. Pemilik akun @markbabylion
11. Pemilik akun @YunaChoiGFRD
12. Pemilik akun @m99lion
13. Pemilik akun @vinraamade
14. Pemilik akun @divesexypnos
15. Pemilik akun @ mforminji
16. Pemilik akun @itsyouraissa
17. Pemilik akun @Blissfulmagenta

18. Pemilik akun @Wafinr1
19. Pemilik akun @istrikakjeong
20. Pemilik akun @JanuariNadia
21. Pemilik akun @jooniekkul12
22. Pemilik akun @yeolshiloey
23. Pemilik akun @cuttiestmyeon
24. Pemilik akun @puppyfluffy\_94
25. Pemilik akun @jeenaanii
26. Pemilik akun @ndoyounng
27. Pemilik akun @helloimdien
28. Pemilik akun @babymarkl
29. Pemilik akun @9fairyexo
30. Pemilik akun @apasii\_vi

#### 1.7.4 Sumber dan Jenis Data

##### 1.7.4.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber atau observasi terhadap suatu fenomena tertentu. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan berupa hasil wawancara yang diperoleh dari subjek penelitian yang aktif di media sosial Twitter serta observasi pengamatan terhadap objek dengan melihat fenomena fans K-Pop dalam mempengaruhi isu media sosial.

#### 1.7.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dan penguat bagi data primer. Data sekunder diperoleh melalui hasil memahami dan mempelajari studi pustaka, bacaan, dokumen dan laporan yang diperoleh dari penelitian terdahulu. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber pada buku-buku atau jurnal yang berkaitan dengan aktivisme media sosial hingga pengaruh K-Pop.

#### 1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

##### 1.7.5.1 Wawancara

Wawancara adalah interaksi antara dua orang yaitu peneliti dan narasumber dengan tujuan mendapatkan informasi melalui tanya jawab. Peneliti menghubungi narasumber lalu memberikan beberapa pertanyaan terkait permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan terkait permasalahan kepada narasumber guna menunjang kedalaman data penelitian yang diperoleh dan mendapatkan informasi tambahan. Pertanyaan yang diberikan seputar fenomena fans K-Pop dalam mempengaruhi media sosial.

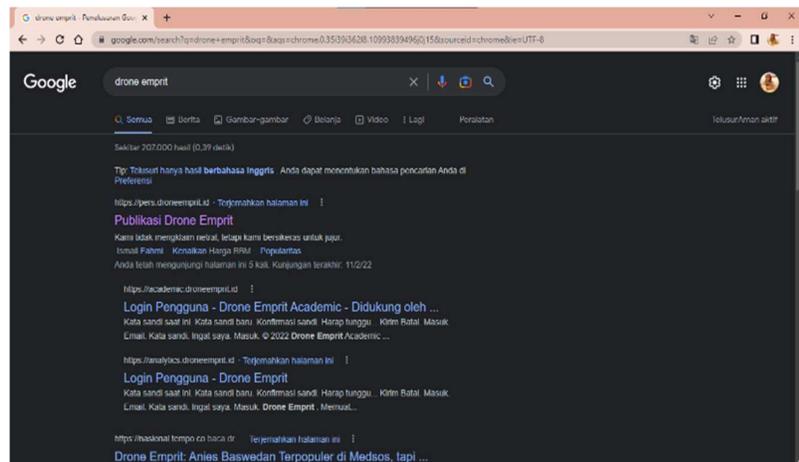
##### 1.7.5.2 Observasi

Observasi merupakan teknik data dengan turun ke lapangan dan melihat langsung fakta yang terjadi di lapangan agar peneliti dapat memperoleh data. Dalam penggunaan observasi ini, dilakukan observasi menggunakan coding etnografi digital dan pengumpulan data

melalui publikasi drone emprit untuk melihat analisis jaringan sosial melalui percakapan di twitter yang mengungkapkan interaksi pengguna, kehadiran hashtag hingga mengidentifikasi aktor paling berpengaruh terhadap segala sesuatu yang dapat diamati dengan teknis sebagai berikut :

Gambar 1. 6  
Langkah Mencari Data menggunakan Drone Emprit

- a. Membuka Drone emprit di google dengan memilih Publikasi Drone Emprit



- b. Masuk ke laman publikasi drone emprit, dan memilih topik apa yang akan dicari.



- c. Setelah menemukan topik yang akan dibahas, akan muncul segala data-data jejaring terkait topik yang akan dibahas.



Sumber: Website Drone Emprit, 2022

#### 1.7.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang sudah ada sebelumnya seperti foto, buku, gambar, catatan literatur, serta hasil penemuan dari penelitian terdahulu. Dokumentasi diperlukan untuk melengkapi wawasan peneliti mengenai hal-hal berbau topik penelitian yang pernah terjadi sebelumnya sehingga penelitian tidak terbatas pada ruang dan waktu.

#### 1.7.6 Analisis Data

##### 1.7.6.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyortiran, pemfokusan, penyederhanaan dan pengolahan data mentah sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama proses keberlangsungan penelitian guna mencari hal yang

dianggap penting dan menemukan pola yang lebih jelas. Apabila gambaran yang dihasilkan dari data yang diteliti sudah terlihat jelas, maka akan mempermudah peneliti untuk menemukan data selanjutnya.

#### 1.7.6.2 Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti melihat gambaran secara lebih khusus dan mendetail. Info akan disusun untuk ditarik kesimpulan sehingga bentuk uraian dan bentuk hubungan antar masing-masing variabel dapat berkaitan dengan masalah yang diangkat.

#### 1.7.6.3 Kesimpulan

Dari data yang ada kemudian dilakukan penarikan kesimpulan untuk melihat validitasnya. Hasil kesimpulan didasarkan dari hasil susunan narasi yang disusun untuk memberikan jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Kesimpulan ini juga akan menjadi akhir dari penelitian sebab berisi mengenai pernyataan dari penelitian yang kita cari.